

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Evaluasi kebijakan penanganan banjir rob di Semarang Utara tahun 2022-2023 menunjukkan bahwa kebijakan belum berhasil menanganai rob di beberapa wilayah di Semarang Utara merasakan manfaat yang signifikan namun wilayah seperti Tambaklorok dan Tanjungmas menghadapi kendala seperti keterbatasan Pompa air. Efisiensi dalam penggunaan anggaran umumnya sesuai dengan rencana, namun beberapa item, seperti pengadaan pompa, tidak tercapai sepenuhnya. Dari sisi sumber daya manusia, alokasi sudah memadai, tetapi diperlukan pelatihan lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas. Kecukupan program menunjukkan bahwa meskipun ada inisiatif yang baik, masih dibutuhkan kebijakan tambahan, terutama dalam pengelolaan air tanah dan peningkatan infrastruktur. Pemerataan dampak kebijakan belum sepenuhnya tercapai, dengan beberapa wilayah seperti Tanjung Mas yang lebih diuntungkan dibandingkan wilayah lain. Responsivitas pemerintah terhadap situasi darurat sudah cukup baik, tetapi perlu perbaikan dalam kecepatan respons dan kesiapan logistik. Meski jadwal pelaksanaan program umumnya dipatuhi, ada keterlambatan di beberapa proyek akibat kendala teknis, dan

target pencapaian belum sepenuhnya terpenuhi, terutama di daerah yang kekurangan infrastruktur pendukung.

2. Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan penanganan rob di Semarang Utara tahun 2022-2023 mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan isi kebijakan. Hambatan utama terletak pada kurangnya frekuensi komunikasi antar lembaga, keterbatasan kemampuan staf dan sarana prasarana, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Selain itu, kendala seperti pembebasan lahan dan resistensi masyarakat terhadap relokasi memperumit pelaksanaan kebijakan. Di sisi lain, dukungan datang dari komunikasi berkala dengan pihak swasta, ketersediaan dana yang cukup, serta penerapan prinsip demokrasi dan keterbukaan yang mulai berjalan baik, meskipun masih perlu ditingkatkan untuk memastikan partisipasi masyarakat yang lebih optimal.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah perlu meningkatkan frekuensi komunikasi dan koordinasi antar lembaga terkait, tidak hanya pada saat darurat, tetapi juga secara rutin untuk memaksimalkan upaya pencegahan dan perencanaan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan harus diperkuat

untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dan membangun kepercayaan publik.

2. Bagi Pihak Swasta

Pihak swasta dapat berperan lebih aktif dalam mendukung peningkatan infrastruktur penanganan rob, khususnya di wilayah-wilayah yang masih kekurangan fasilitas seperti pompa air. Kemitraan dengan pemerintah dalam hal ini bisa diperluas untuk memastikan penyediaan sarana prasarana yang memadai dan tepat waktu, serta mendukung program-program pelatihan untuk staf terkait.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu lebih aktif dalam mengikuti sosialisasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan berpartisipasi dalam program mitigasi rob. Selain itu, masyarakat dapat lebih kooperatif dalam proses relokasi atau kebijakan lain yang bertujuan untuk meminimalkan dampak rob, sehingga proses penanganan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.